



**RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPPA SKPD**

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1.06 Sosial
Unit Organisasi : 1.06.01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARAH KEMASYARAKATAN
Sub Unit Organisasi : 1.06.01.01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARAH KEMASYARAKATAN

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA	11.549.676.000,00	15.238.415.000,00	3.688.739.000,00	31,94
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.374.676.000,00	5.866.723.000,00	492.047.000,00	9,15
5.1.1	Belanja Pegawai	5.374.676.000,00	5.866.723.000,00	492.047.000,00	9,15
5.2	BELANJA LANGSUNG	6.175.000.000,00	9.371.692.000,00	3.196.692.000,00	51,77
5.2.1	Belanja Pegawai	377.762.000,00	670.492.000,00	292.730.000,00	77,49
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.316.388.000,00	6.613.950.000,00	1.297.562.000,00	24,41
5.2.3	Belanja Modal	480.850.000,00	2.087.250.000,00	1.606.400.000,00	334,08
	SURPLUS / (DEFISIT)	(11.549.676.000,00)	(15.238.415.000,00)	(3.688.739.000,00)	31,94

RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN

NO.	URAIAN	TRIWULAN					JUMLAH
		I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.466.676.000,00	1.466.676.000,00	1.466.676.000,00	1.466.695.000,00	5.866.723.000,00	
2.2	Belanja Langsung	2.133.120.500,00	3.466.831.000,00	1.832.599.000,00	1.939.141.500,00	9.371.692.000,00	

**KEPALA DINAS SOSIAL, PPPA,
PENGENDALIAN PENDUDUK & KB**

LUDFUL HAKIM,SH

NIP.19591009 198912 1 001

KUDUS, 22 October 2018

Menyetujui

SEKRETARIS DAERAH

SAM'ANI INTAKORIS, ST. MT.

NIP. 19690721 199703 1 005

Surat Pengesahan ini berlaku sebagai dasar pencairan dana bagi Kas Daerah. Tanggung Jawab terhadap penetapan dan perhitungan biaya serta penggunaan dana yang tertuang dalam DPPA -SKPD sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran.